

**Analisis Implementasi Kebijakan
Jaminan Persalinan Dalam
Meningkatkan Cakupan Persalinan
Tenaga Kesehatan di Kabupaten
Situbondo Tahun 2013**

Oleh : Gurendro Putro

Pendahuluan

- Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, pasal 5 ayat (1)



setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

Pendahuluan

- Latar Belakang

AKB dan AKI masih cukup tinggi

Fakta

tiga terlambat (“3T”)

empat terlalu (“4T”)

Penyebab

persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan

Cara mengatasi

keterbatasan dan ketidak-tersediaan biaya

Kendala

Jaminan Persalinan

Solusi

Pendahuluan

- **Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana tingkat kepercayaan ibu hamil terhadap pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan?
2. Bagaimana komitmen tenaga kesehatan dalam menjalankan kebijakan jampersal?
3. Bagaimana kegiatan sosialisasi kebijakan jampersal di masyarakat?

Pendahuluan

- Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kepercayaan ibu hamil terhadap pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan?
2. Apakah tenaga kesehatan yang terlibat dalam pertolongan persalinan mempunyai komitmen dalam memberikan pertolongan (mengingat jumlah insentif, prosedur administrasi / klaim uang persalinan dari tenaga kesehatan ke dinas kesehatan kabupaten/kota)?
3. Bagaimana sosialisasi kebijakan jampersal di masyarakat?

Tujuan Penelitian

- **Tujuan umum**

Mengetahui implementasi kebijakan jampersal di kabupaten Situbondo.

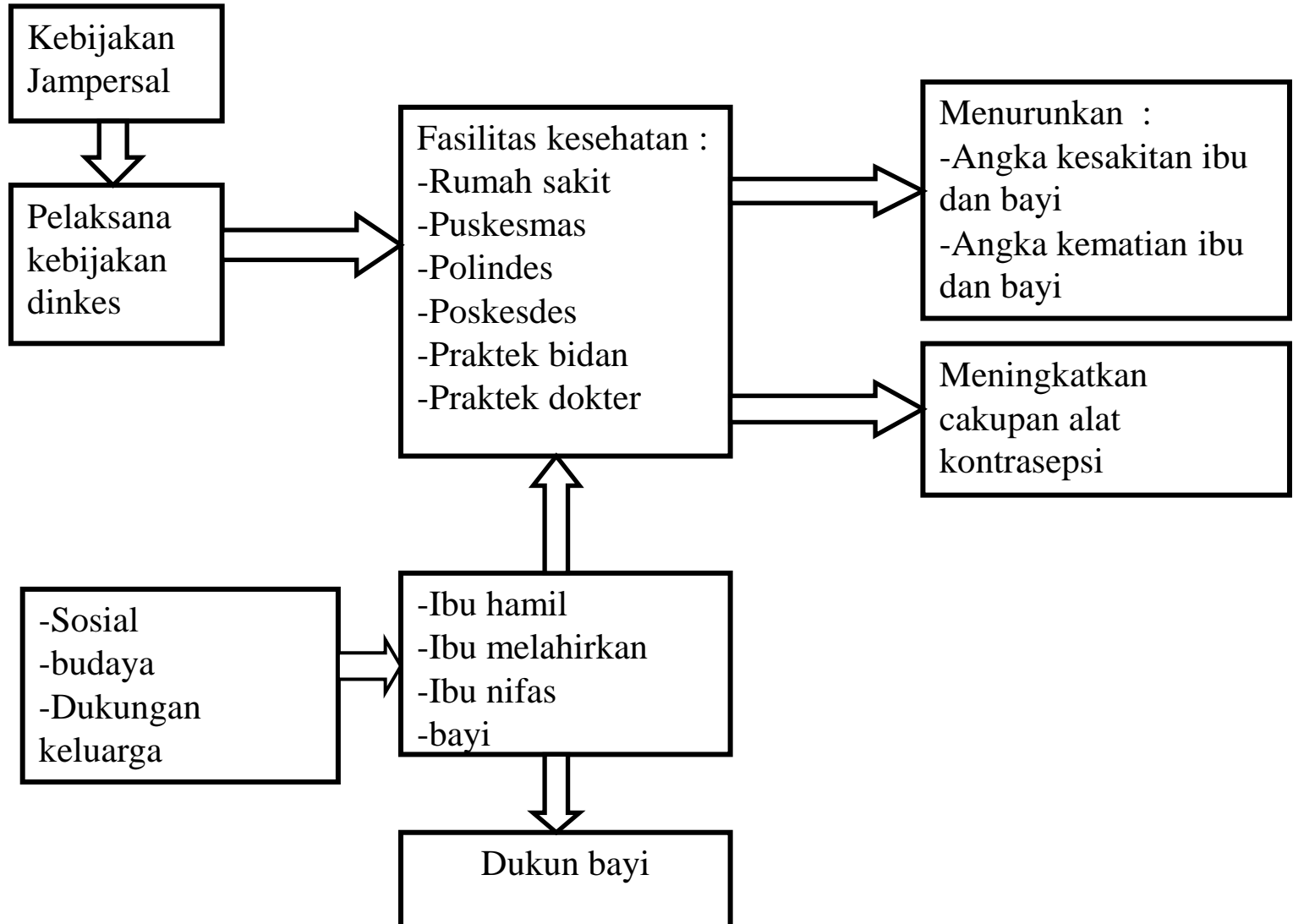
- **Tujuan khusus**

1. Mengetahui tingkat kepercayaan ibu hamil dalam memanfaatkan jampersal.
2. Mengetahui komitmen tenaga kesehatan dalam menjalankan kebijakan jampersal.
3. Mengetahui sosialisasi kebijakan jampersal di masyarakat.

Manfaat penelitian

1. Dapat dipakai sebagai masukan dalam pelaksanaan atau perbaikan kebijakan jampersal
2. Memberi tambahan wawasan keilmuan dalam bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Kerangka konsep



Metode Penelitian

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan *cross sectional*, yang mengambil data pada waktu tertentu.

Metode Penelitian

Populasi

Penentuan populasi dan besar sampel dari penelitian dilakukan secara *purposive sampling*. Populasi penelitian ini adalah tenaga kesehatan dan ibu hamil.

Metode Penelitian

- **Sampel dan Besar Sampel**

A. Kriteria *Inklusif*

1. Kabupaten atau kota yang menyelenggarakan kebijakan jampersal
2. Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan kebijakan jampersal

Metode Penelitian

Sampel dan Besar Sampel

B. Kriteria Eksklusif

1. Pelayanan kesehatan swasta yang tidak bekerjasama dengan dinas kesehatan dalam menyelenggarakan jampersal
2. Dukun bayi

Besar sampel dalam penelitian ini adalah 40 orang bidan yang bekerja di wilayah kabupaten Situbondo dan 40 orang ibu yang pernah melahirkan pada periode tahun 2011 sampai dengan 2013.

Metode Penelitian

Cara Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* pada tenaga kesehatan yang membidangi tentang jaminan persalinan di dinas kesehatan dan tenaga bidan yang berada di wilayah kabupaten Situbondo serta ibu yang sudah pernah melahirkan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

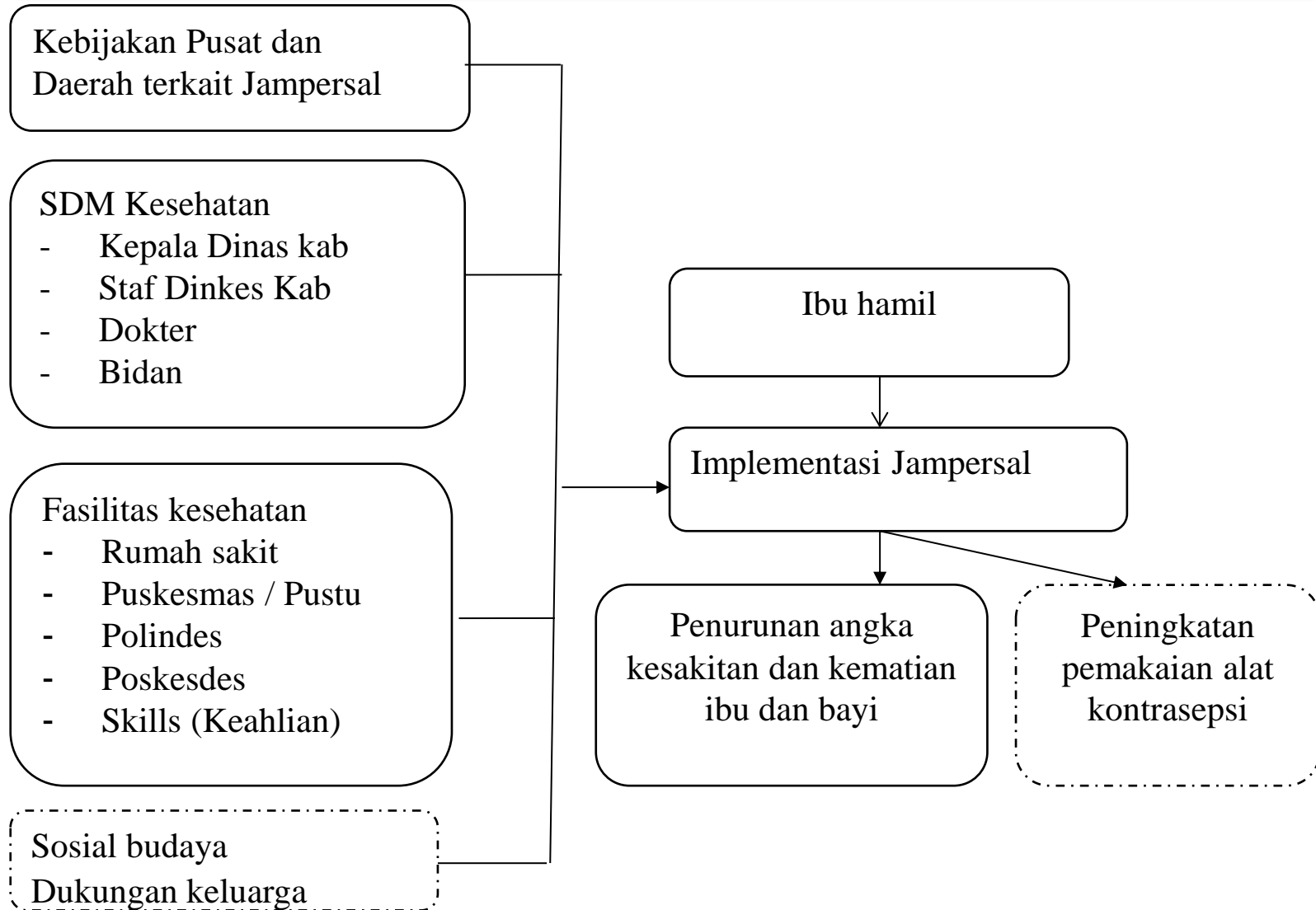
Metode Penelitian

Variabel Penelitian

1. Kebijakan pusat, propinsi dan kabupaten tentang jampersal
2. Kebijakan Provinsi Jawa Timur tentang jampersal
3. Kebijakan Kabupaten Situbondo tentang jampersal
4. Tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan jampersal
5. Ibu hamil
6. Sosial budaya masyarakat
7. Dukungan keluarga dalam persalinan

Metode Penelitian

Kerangka Operasional



Hasil Penelitian

Kondisi Umum Kabupaten Situbondo

Secara budaya, kabupaten Situbondo merupakan daerah pandalungan, artinya perpaduan antara budaya jawa dan madura, bahkan sebagian penduduk menggunakan bahasa madura. Pada masyarakat yang demikian ini, kepatuhan terhadap pemimpin atau Kiayi atau pemilik pondok pesantren sangat tinggi.

Hasil Penelitian

Tingkat kepercayaan ibu hamil dalam memanfaatkan Jampersal

Tabel I Karakteristik responden ibu yang pada periode kebijakan Jaminan Persalinan di kabupaten Situbondo tahun 2013.

Karakteristik	Frekuensi	Prosentase
Umur		
≤ 29 tahun	20	50%
≥ 30 tahun	20	50%
Pendidikan		
≤ tamat SD	22	55%
≥ tamat SMP	18	45%
Jumlah anak		
≤ 2 anak	28	70%
≥ 3 anak	12	30%
Penolong persalinan		
Dukun bayi	3	7,5%
Tenaga kesehatan	37	92,5%
Biaya Persalinan		
Gratis	28	70%
Bayar	12	30%

Hasil Penelitian

Komitmen tenaga kesehatan dalam menjalankan kebijakan Jampersal

Tabel 2 Komitmen Bidan dalam menjalankan progam Jaminan Persalinan di kabupaten Situbondo tahun 2013

Komitmen	Jumlah	Persentase
Kurang	9	22,5
Sedang	11	27,5
Baik	20	50,0
Total	40	100,0

Hasil Penelitian

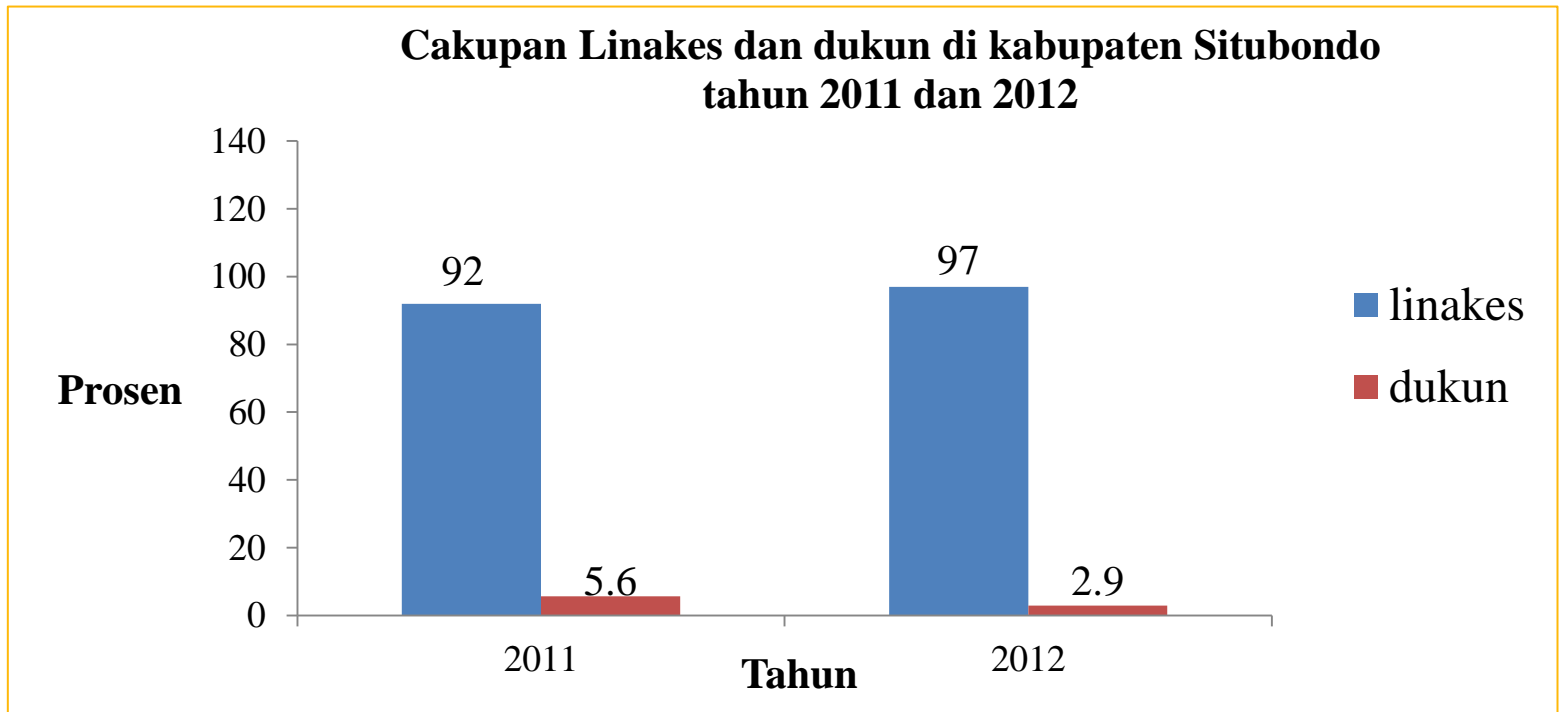
Komitmen tenaga kesehatan dalam menjalankan kebijakan Jampersal

Tabel 3 Tabulasi silang masa kerja dengan Komitmen Bidan dalam menjalankan progam Jaminan Persalinan di kabupaten Situbondo tahun 2013

masa kerja	Komitmen			Total
	Kurang	Sedang	Baik	
1-9 tahun	3 (33,3%)	6 (54,5%)	10 (50,0%)	19 (47,50%)
10 – 19 tahun	1 (11,1%)	3 (27,3%)	6 (30,0%)	10 (25,0%)
≥ 20 tahun	5 (55,6%)	2 (18,2%)	4 (20,0%)	11 (27,5%)
Total	9 (100%)	11 (100%)	20 (100%)	40 (100%)

Hasil Penelitian

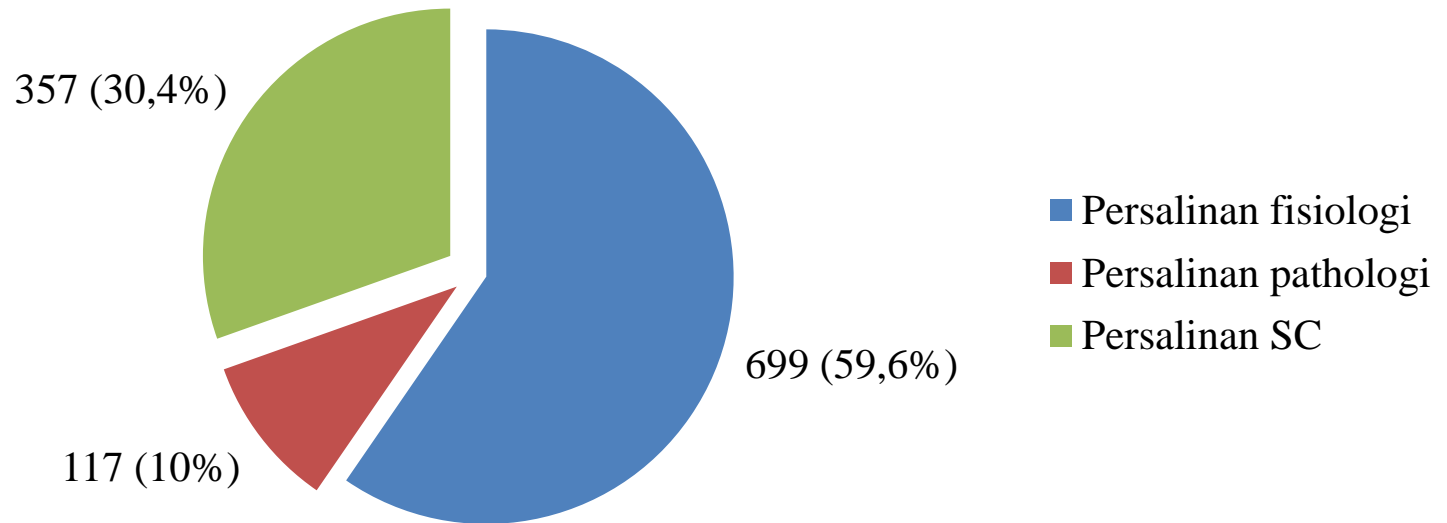
Komitmen tenaga kesehatan dalam menjalankan kebijakan Jampersal



Hasil Penelitian

Komitmen tenaga kesehatan dalam menjalankan kebijakan Jampersal

Persalinan di RSUD Abdoer Raheem Kab Situbondo tahun 2012



Hasil Penelitian

Sosialisasi kebijakan jampersal di masyarakat

1. Pemasangan spanduk tentang Jampersal dilakukan pada Puskesmas dan Puskesmas pembantu.
2. Sosialisasi pada LSM dan PKK Kabupaten Situbondo, disampaikan petugas kesehatan dinas kesehatan sebagai pembicara pada acara tersebut
3. Secara administrasi perlu dibenahi agar lebih simpel dan mudah
4. Sosialisasi pada aparat pemerintah daerah, lintas sektor, legislatif, agar mendapat dukungan baik finansial dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan Jampersal
5. Ibu yang masih mempunyai kesempatan untuk hamil dan mempunyai anak, juga seharusnya mendapat sosialisasi kebijakan Jampersal diantaranya melalui PKK

Kesimpulan

1. Secara budaya, kabupaten Situbondo merupakan daerah pandalungan
2. Tingkat kepercayaan ibu hamil menggunakan tenaga kesehatan sebesar 92,5%.
3. Komitmen tenaga kesehatan dalam menjalankan kebijakan Jampersal masih tinggi
4. Sosialisasi kebijakan Jampersal belum berjalan dengan baik, hanya sebatas pada tenaga kesehatan, dan kelompok tertentu

Saran

1. Masih adanya persalinan oleh dukun bayi, maka sebaiknya bidan bekerjasama dengan dukun bayi dalam hal perawatan bayi misalnya cara memandikan yang benar dan memberi insentif ketika berkolaborasi dalam penanganan persalinan.
2. Sebaiknya petugas kesehatan mendapat pelatihan tentang teknis kebidanan, untuk meningkatkan skill (ketrampilan) dalam perawatan kehamilan, penanganan risiko kehamilan serta pasca partus.
3. Sosialisasi kebijakan Jampersal sebaiknya lewat tokoh masyarakat, para Kiayi dan PKK baik ditingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan.